



LEMBARAN KALURAHAN  
KALURAHAN PIYAMAN

Nomor 10

Tahun 2025

LURAH PIYAMAN  
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PERATURAN KALURAHAN PIYAMAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH PIYAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 7 Tahun 2025;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan, dan sudah mendapatkan Evaluasi dari Panewu Wonosari Nomor : 69/KPTS/2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang – Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah berubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa TA 2025;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
11. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
12. Peraturan Gubernur D I Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;  
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelurahan;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
16. Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;  
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
20. Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Piyaman Tahun 2022 s/d 2027 (Lembaran Kalurahan Piyaman Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Piyaman Tahun 2022 s/d 2027;
21. Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP KAL) Kalurahan Piyaman Kapanewon Wonosari Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Piyaman Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PIYAMAN  
Dan  
LURAH PIYAMAN  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN  
2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran  
2025 sebesar Rp 4.015.786.438,-, dengan rincian sebagai  
berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 4.185.543.680
2. Belanja Kalurahan	Rp 4.015.786.438
<i>Surplus/(Defisit)</i>	<i>Rp 169.757.242</i>
3. Pembiayaan Kalurahan	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 115.242.758
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 285.000.000
<i>Selisih Pembiayaan (3.1– 3.2)</i>	<i>Rp. 169.757.242</i>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum  
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan  
dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penjabaran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan sebagai  
landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Piyaman.

Ditetapkan di : Piyaman

pada tanggal : 30 Desember 2025

LURAH PIYAMAN

ttd

T U G I N O

Diundangkan di : Piyaman

pada tanggal : 30 Desember 2025

CARIK

ttd

S U J A D I

LEMBARAN KALURAHAN PIYAMAN TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN PIYAMAN

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PIYAMAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	642.385.980,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.517.957.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.185.543.680,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	843.793.356,08	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	847.379.557,92	
5.3.	Belanja Modal	2.277.393.524,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	47.220.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.015.786.438,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	169.757.242,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	115.242.758,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	115.242.758,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	285.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	235.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(169.757.242,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGERBOH I, 30 December 2025

LURAH

ttd

TUGINO, S. Pd

LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN PIYAMAN

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PIYAMAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	642.385.980,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.517.957.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.185.543.680,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.352.529.513,08	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.054.405.941,08	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	684.129.550,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	684.129.550,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.638.126,08	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	44.638.126,08	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	105.967.765,00	ADD, DLL, PAD
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.967.765,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	67.050.000,00	ADD, PAD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	67.050.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18.153.780,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.06 5.1.	Belanja Pegawai	265.680,00	
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.888.100,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	66.525.720,00	PAD, PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.525.720,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.231.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.231.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	35.477.034,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19.750.293,00	DLL, PBH, PBP
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.750.293,00	
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.226.741,00	DLL, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.226.741,00	PBH
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.050.000,00	
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	8.450.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>38.435.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	36.895.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.895.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.540.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>163.679.150,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	20.250.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	14.190.000,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.190.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	17.843.483,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.843.483,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.825.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.825.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.240.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.240.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.200.000,00	PAD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	32.450.667,00	ADD, PAD, PBH,
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.450.667,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	13.075.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.075.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	43.605.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.605.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>60.532.388,00</b>	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	48.675.000,00	PAD, PBH
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.675.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	1.857.388,00	PAD
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	1.857.388,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.893.750.014,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>328.493.788,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	21.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman	143.593.264,00	DDS
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.534.764,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	142.058.500,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	163.300.524,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.354.524,00	
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	159.946.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	175.656.622,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	39.691.622,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.691.622,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	27.460.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.960.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	10.040.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.040.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	93.240.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.240.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	5.225.000,00	PBP
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.225.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.061.099.604,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	120.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	200.176.636,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	200.176.636,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	122.488.324,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.278.324,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	120.210.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	52.146.644,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.264.644,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	50.882.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	566.288.000,00	DDS, SWD
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.525.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	563.763.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	28.500.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukim an	28.500.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	PBP
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	300.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	300.000.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>65.711.910,92</b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.530.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	4.530.000,00	ADD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.530.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.655.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	12.385.000,00	PAD, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.385.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.270.000,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.466.910,92	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	12.835.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.835.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.631.910,92	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.631.910,92	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.060.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.270.000,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	3.870.000,00	PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.870.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	16.220.000,00	PAD, PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.220.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.700.000,00	ADD, PAD, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>656.575.000,00</b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	609.180.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4.405.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.405.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.775.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.775.000,00	
4.2.93		Pembangunan/rehabilitasi lumbung desa	600.000.000,00	PBP
4.2.93	5.3.	Belanja Modal	600.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.965.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.340.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.340.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.625.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.625.000,00	DDS
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.110.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.690.000,00	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.690.000,00	DDS
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.420.000,00	
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	DDS
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.320.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.320.000,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.320.000,00	DLL
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	24.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	24.000.000,00	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	DDS
5		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DAN PEMBIAYAAN</u></b>	<b>47.220.000,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	40.220.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	40.220.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.220.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.015.786.438,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	169.757.242,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	115.242.758,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	285.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(169.757.242,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGERBOH I, 30 December 2025

LURAH

ttd

TUGINO, S. Pd